

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, disajikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar bagi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Tinjauan Pustaka dimulai dengan penjelasan mengenai konsep dasar variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan peneliti sebelumnya serta pengembangan kerangka hipotesis yang menggambarkan model variabel. Terakhir, peneliti akan membahas hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Kajian Teoritis

2.1.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Menurut Todaro & Smith (2013) Pembangunan manusia adalah investasi produktif dalam diri individu, termasuk Pendidikan, Kesehatan, keterampilan, yang berperan dalam meningkatkan kapasitas individu untuk memproduksi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Todaro menggaris bawahi bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi materi saja, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan manusia dipahami sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk memperluas berbagai pilihan yang dapat diakses oleh masyarakat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam laporan “*Global Human Development Report*”. Konsep ini disebut sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP,

pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the people's choices*) yang dapat dilihat sebagai proses upaya kearah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, dan juga sekaligus sebagai upaya dalam pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/ketrampilan mereka. (Winda *et al.*, 2014)

2.1.1.2 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertama kali diperkenalkan Oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Menurut Lubin (1992), Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Indeks* (HDI) merupakan indikator yang mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan hasil pembangunan ekonomi. IPM atau HDI ini, terdiri atas tiga indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia di suatu negara, yaitu:

- a. Tingkat kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir atau tingkat kematian bayi
- b. Tingkat pendidikan yang dinilai dari jumlah penduduk yang melek huruf, tingkat pencapaian pendidikan masyarakat, dan rata-rata lama pendidikan.
- c. Standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan komponen-komponen dasar kualitas hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), dalam publikasi

“Indeks Pembangunan Manusia 2018”, IPM dibangun melalui tiga indikator utama yang mencerminkan kualitas hidup, yaitu:

- a. Umur panjang dan sehat
- b. Pengetahuan
- c. Standar kehidupan layak

Menurut Todaro (2006), terdapat tiga komponen dasar atau nilai inti keberhasilan pembangunan yaitu:

- a. Kecukupan (*sustenance*), yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Seperti pangan, sandang, papan, Kesehatan, dan keamanan.
- b. Jati diri (*self-esteem*), yang merupakan bagian dari kehidupan yang lebih baik, mencakup dorongan untuk maju, menghargai diri sendiri, dan merasa layak dalam mengejar sesuatu.
- c. Kebebasan (*freedom*), yang merupakan kemampuan untuk memiliki nilai *universal* dalam pembangunan manusia yaitu kemerdekaan.

2.1.1.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik yang terdiri dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks pengeluaran, yang mana dimensi pendidikan dihitung dengan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh individu berusia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Perhitungan RLS dilakukan berdasarkan jumlah penduduk yang berusia di atas 25 tahun. Selain mengasumsikan bahwa

pendidikan berakhir pada usia 25 tahun, perhitungan ini juga mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh UNDP. Rumus perhitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu:

$$IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

Selain RLS, dalam dimensi pendidikan juga terdapat Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS ini mengukur jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan akan ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa depan. HLS ini juga digunakan untuk menilai perkembangan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang dihitung dalam bentuk tahunan, serta untuk menggambarkan tingkat pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Rumus perhitungan Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

Dan untuk menghitung indeks pendidikan secara keseluruhan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{(IHLS + IRLS)}{2}$$

Dalam dimensi kesehatan, pengukuran dilakukan melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah perkiraan rata-rata tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan tingkat dan ukuran derajat kesehatan suatu populasi. Rumus Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Selanjutnya yang terakhir adalah dimensi pengeluaran perkapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Rata-rata pengeluaran perkapita pertahun ini yang diperoleh melalui survei yang dihitung dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Rumus perhitungan pengeluaran perkapita yaitu:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran max}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

Setelah mendapatkan data di atas, dilanjutkan dengan rumus IPM secara keseluruhan yang mana dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut berkisaran antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran seperti yang disarankan oleh BPS. Setelah mendapatkan hasil dari rumus di atas, nilai dapat dicocokkan berdasarkan tiga kategori berikut:

- a. Apabila nilai IPM kurang dari 50 maka IPM masuk kekategori rendah.
- b. Apabila nilai IPM antara 50 sampai 80 ($50 < IPM < 80$) maka IPM termasuk kategori sedang.
- c. Apabila nilai IPM di atas 80 maka IPM masuk kekategori tinggi.

2.1.1.4 Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Teori Kebutuhan Dasar

Teori Kebutuhan Dasar yang dikembangkan oleh Paul Streeten dan rekan-rekannya menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, air bersih, kesehatan, perumahan, dan pendidikan,

sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan. Pendekatan ini berpendapat bahwa pembangunan yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika kebutuhan-kebutuhan esensial tersebut dipenuhi terlebih dahulu, sehingga memungkinkan individu untuk hidup dengan layak dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, teori kebutuhan dasar menawarkan perspektif yang lebih manusiawi dalam pembangunan, dengan menempatkan kesejahteraan individu sebagai prioritas utama. Pendekatan ini berbeda dengan pandangan tradisional yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan distribusi manfaatnya. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan manusia dan pengentasan kemiskinan. (Diebold & Streeten, 1982).

2. Teori Kapabilitas

Berdasarkan teori pembangunan berbasis kesejahteraan atau teori kapabilitas (*Capability Approach*). Seorang ekonom pemenang Nobel, Amartya Sen berargumen bahwa pembangunan manusia seharusnya lebih berfokus pada “kapabilitas” atau kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai penting. Sen berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan, melainkan dengan kemampuan individu untuk mengakses pilihan hidup yang lebih baik, seperti kesehatan yang baik, pendidikan, dan partisipasi sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam pandangan Sen, mencerminkan

lebih dari sekedar standar hidup material. Tetapi juga mencakup kemampuan untuk mencapai potensi manusia yang optimal (Ahmad & Wasito, 2023).

Mahbub Ul Haq seorang ekonomi asal Pakistan bersama Amartya Sen mengembangkan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 1990 sebagai alternatif dari PDB yang sempit, Haq berargumen bahwa pengukuran kesejahteraan suatu negara tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dari kondisi sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesejahteraan manusia dengan mengukur capaian manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Haq, 2017)

2.1.1.5 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Pada prinsipnya, PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh unit ekonomi di wilayah tersebut (BPS Surakarta, 2019).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Indikator ini tidak hanya menggambarkan bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebar dan siapa yang sebenarnya merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga

seberapa efektif pembangunan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Sukirno, 1985).

2.1.1.6 Pengukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (2020), terdapat dua metode dalam perhitungan PDRB, yaitu metode langsung dan tidak langsung, yang dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Metode Langsung

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan dengan menggunakan dua jenis harga, yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. Secara konseptual, perhitungan PDRB dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

a. Pendekatan Produksi:

Menurut pendekatan ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan/satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan dalam tujuh belas lapangan usaha, yaitu:

- 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengaolahan
- 4) Pengadaan listrik dan gas
- 5) Pengadaan air

- 6) Kontruksi
- 7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- 8) Transportasi dan pergudangan
- 9) Penyediaan akomodasi dan makan minum
- 10) Informasi dan komunikasi
- 11) Jasa keuangan
- 12) *Real estate*
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
- 15) Jasa pendidikan
- 16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- 17) Jasa lainnya.

Rumus yang digunakan pada pendekatan produksi ini sebagai berikut

$$Y = (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + \dots (Pn \times Qn)$$

Keterangan;

Y : Pendapatan Nasional

P : Harga barang

Q : Harga

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengacu pada total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu wilayah atau negara

dalam periode waktu tertentu, biasanya tahunan. Balas jasa tersebut meliputi upah, gaji, sewa tanah, bunga modal, serta keuntungan yang semuanya dihitung sebelum pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Selain itu, PDRB ini juga mencakup penyusutan serta pajak tidak langsung neto (selisih antara pajak tidak langsung dan subsidi).

Rumus yang digunakan pada pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut:

$$Y = R + W + I + P$$

Keterangan:

Y : Pendapatan nasional

I : Bunga

R : Sewa

P : Laba

W : Gaji/upah

c. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- 2) Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga
- 3) Konsumsi pemerintah
- 4) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 5) Perubahan inventori dan diskrepansi statistic

6) Ekspor barang dan jasa

7) Impor barang dan jasa

Rumus yang digunakan pada pendekatan pengeluaran ini adalah sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y : Pendapatan nasional

C : Konsumsi rumah tangga

G : Pengeluaran pemerintah

I : Investasi

X : Ekpor

M : Impor

Ketiga pendekatan di atas, digunakan untuk menunjukkan hubungan yang erat antara tiga konsep, jumlah barang dan jasa yang diproduksi, jumlah pendapatan yang diterima, dan bagaimana pendapatan tersebut digunakan. Hubungan ini dapat digambarkan dengan persamaan matematis yang sederhana. Seperti halnya pada perhitungan PDB (Produk Domestik Bruto) tingkat nasional, perhitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di tingkat wilayah juga dilakukan dengan tiga pendekatan yang sama, yaitu dari sisi sektor produksi, sisi penggunaan, dan sisi pendapatan. Pertemuan ketiga aspek ini disebut sebagai titik keseimbangan antara penyediaan dan permintaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung ini merupakan metode perhitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi ke kabupaten/kota dengan memakai berbagai macam indikator produksi atau indikator lainnya yang cocok sebagai alokator. Alokator yang dapat digunakan dapat didasarkan atas:

- a. Nilai produksi bruto atau neto
- b. Jumlah produksi
- c. Tenaga kerja
- d. Penduduk
- e. Alakator lainnya yang dianggap cocok untuk daerah tersebut.

2.1.1.7 Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Terdapat beberapa teori dalam buku Wahyuni, *et al*, (2024) yang relevan dengan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai berikut:

1. Teori Neo Klasik

Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari faktor seperti sumber daya manusia, akumulasi modal, penerapan teknologi modern, serta hasil atau output yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Solow, pertumbuhan penduduk perlu dimanfaatkan sebagai sumber daya yang memberikan dampak positif.

2. Teori Pertumbuhan Wilayah

Menurut Richardson (1991) dalam (Wahyuni, *et al* 2024), menyatakan teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian penting dari analisis ekonomi wilayah dan perkotaan, karena pertumbuhan adalah salah satu elemen utama dalam pembangunan ekonomi wilayah serta memiliki dampak kebijakan yang luas. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa beberapa wilayah tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Pertumbuhan ekonomi wilayah mengacu pada peningkatan pendapatan masyarakat di suatu daerah, yang diukur dari kenaikan nilai tambah secara keseluruhan dalam harga konstan (riil). Peningkatan ini juga mencerminkan imbalan bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. Kemakmuran suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya nilai tambah yang dihasilkan, tetapi juga oleh transfer pembayaran, yaitu aliran pendapatan yang keluar atau masuk dari wilayah lain.

2.1.1.8 Pengertian Infrastruktur

Secara umum, hingga saat ini definisi infrastruktur masih belum sepenuhnya jelas. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infrastruktur diartikan sebagai sarana dan prasarana umum yang mendukung kelancaran berbagai kegiatan. Sarana tersebut mencakup berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, yang dikenal sebagai barang publik, seperti jalan, rumah sakit, jembatan, sekolah, sistem sanitasi, layanan telepon, dan lain-lain.

Infrastruktur diartikan sebagai seperangkat fasilitas yang terdiri atas barang maupun jasa yang disediakan untuk dapat menunjang kebutuhan publik atau masyarakat luas (Srinivasu, 2013). *World Bank* (1994) dalam (Faradis, 2020) membagi infrastruktur menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, mencakup asset fisik yang menyediakan layanan untuk mendukung proses produksi dan konsumsi akhir seperti prasarana umum (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas), pekerjaan umum (bendungan, saluran irigasi, dan drainase), serta sektor transportasi (jalan raya, angkutan umum, kereta api, pelabuhan, dan bandara).
2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang berperan dalam mendukung perkembangan kesehatan dan keterampilan masyarakat yang meliputi sektor pendidikan (sekolah, pelatihan balai kerja, dan perpustakaan), sektor kesehatan (klinik, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya), serta penyediaan tempat untuk rekreasi/hiburan (taman bermain, Pantai, museum, dan lain-lain).
3. Infrastruktur administrasi/institusi, merupakan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum, pengelolaan administrasi yang teratur, serta pengembangan kerja sma dan kebudayaan.

2.1.1.9 Infrastruktur Pendidikan

Pendidikan adalah proses awal dalam sosialisasi yang mencakup nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Fungsi pendidikan adalah mempersiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja, agar dapat bekerja secara produktif berkat kualitas yang dimiliki. Dengan demikian, hal ini akan mendorong

peningkatan hasil yang diharapkan. Apabila kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan baik, maka sumber daya manusia yang dihasilkan pun akan memiliki kualitas yang tinggi (Moh Yamin, 2009). Menurut Mulyasa dalam (Nasrudin & Maryadi, 2019) Sarana pendidikan adalah peralatan dan fasilitas yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses pendidikan, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Ini mencakup gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pembelajaran. Dengan demikian, efektivitas sarana pendidikan akan tercapai jika digunakan secara optimal oleh tenaga pendidik yang bersangkutan.

Infrastruktur sekolah merupakan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan. Sekolah akan menyediakan layanan pendidikan, dalam bentuk proses belajar mengajar, sehingga setiap siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang mereka butuhkan (Hadijah Siti, 2024).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023) dalam publikasinya menyatakan penduduk usia sekolah diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS terbagi dalam empat kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. APS menggambarkan sejauh mana lembaga pendidikan dapat menyerap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi nilai APS, semakin besar pula jumlah penduduk yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

2.1.1.10 Pengukuran Rasio Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas serta relevansi dan manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan yang sesuai dengan kebutuhan perubahan.

Undang-undang ini juga menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional terdiri atas pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah (SMP, SMA) dan pendidikan tinggi (Universitas) (Umasangadji, 2015).

Terdapat 4 (empat) jenis fasilitas pendidikan menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/1987, yaitu:

- a. Taman Kanak-kanak (TK): merupakan fasilitas pendidikan yang paling dasar, yang diperuntukan bagi anak-anak usia 5-6 tahun.
- b. Sekolah Dasar (SD): merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan untuk anak-anak usia antara 6-12 tahun.
- c. Sekolah Menengah Pertama: merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan Sekolah Dasar (SD), usia antara 13-15 tahun.
- d. Sekolah Menengah Umum: merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), usia antara 16-18 tahun.

Menurut Disdik, (2018), rumusan rasio fasilitas pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan digunakan untuk menilai apakah jumlah sekolah atau fasilitas pendidikan sudah cukup untuk menampung anak-anak usia pendidikan disetiap tingkat. Rasio ini penting untuk perencanaan pendidikan dan memastikan pemerataan akses pendidikan diseluruh daerah, berikut perhitungannya:

$$\text{Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan} = \frac{\text{Jumlah Fasilitas Pendidikan (SD, SMP, SMA)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Pendidikan (SD, SMP, SMA)}} \times 10.000$$

2.1.1.11 Infrastruktur Kesehatan

Definisi kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) menekankan pentingnya kesejahteraan secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Hal ini berarti bahwa kesehatan tidak hanya diukur dari ketiadaan penyakit fisik, tetapi juga melibatkan kesehatan mental yang baik dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa hambatan berarti.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 pada Pasal 1 nomor 2, yang mengatur tentang Infrastruktur Kesehatan, penyediaan infrastruktur kesehatan mencakup berbagai kegiatan penting. Kegiatan ini dimulai dengan pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk membangun atau meningkatkan kapasitas infrastruktur kesehatan yang ada. Selain itu, terdapat juga proses pengelolaan yang memastikan infrastruktur berfungsi dengan baik, serta pemeliharaan yang rutin untuk menjaga agar infrastruktur tetap optimal dan dapat terus memberikan manfaat jangka panjang. Semua kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas infrastruktur di sektor kesehatan, dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat.

Infrastruktur kesehatan merupakan segala sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini mencakup fasilitas fisik seperti rumah sakit, puskesmas dan lainnya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan (Pohan & Halim, 2017).

Rumah sakit merupakan infrastruktur kesehatan, dimana masyarakat umum bisa mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Hal ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Selain rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya yang biasanya disediakan oleh pemerintah salah satunya adalah puskesmas (Hadijah, 2024).

2.1.1.12 Pengukuran Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Menurut Pohan & Halim (2018), menyatakan Infrastruktur kesehatan terbagi menjadi dua kategori, yaitu infrastruktur kesehatan fisik dan infrastruktur kesehatan nonfisik. Infrastruktur fisik kesehatan mencakup bangunan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, serta fasilitas pendukung lainnya seperti jalan raya, rel kereta api, dan bandara. Sementara itu, infrastruktur kesehatan nonfisik berkaitan dengan ketersediaan tenaga medis di fasilitas kesehatan, aksesibilitas, dan berbagai hal lainnya yang mendukung pelayanan kesehatan

Keberadaan infrastruktur jelas sangat penting. Namun, selain itu, faktor yang turut memengaruhi pembangunan kesehatan adalah aksesibilitas, yaitu sejauh mana infrastruktur kesehatan dapat dijangkau oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, tidak semua penduduk tinggal di daerah perkotaan; mayoritas masih tinggal di daerah pedesaan, sementara sebagian besar infrastruktur kesehatan terpusat di perkotaan. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai juga menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di sektor kesehatan.

Menurut Kemkes, (2019), rumusan rasio fasilitas kesehatan digunakan untuk menilai apakah jumlah rumah sakit atau fasilitas kesehatan sudah cukup

untuk menampung kebutuhan masyarakat. Rasio ini penting untuk perencanaan kesehatan dan memastikan pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh daerah, berikut perhitungannya:

$$\text{Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan} = \frac{\text{Jumlah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah sakit)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$$

2.1.1.13 Infrastruktur Jalan

Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, pasal 1 nomor 4 menjelaskan bahwa jalan merupakan sarana transportasi darat yang mencakup berbagai bagian dari jalan itu sendiri, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas. Jalan ini bisa berada dipermukaan tanah, dibawah tanah, maupun di atas permukaan air, kecuali untuk jalan kereta api, jalan kabel, dan jalan lori.

Menurut Sukirman (2018), infrastruktur jalan adalah jalan yang dibangun di atas permukaan bumi oleh manusia dengan desain, konstruksi, dan ukuran tertentu, agar dapat digunakan untuk mempermudah transportasi barang, orang, dan berbagai keperluan lainnya dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih efisien dan cepat.

Jalan raya merupakan infrastruktur yang mempermudah masyarakat dalam bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jalan raya juga dapat mempermudah distribusi berbagai barang/kebutuhan masyarakat secara umum, seperti bahan pangan, obat-obatan, bahan bangunan, dan lainnya (Hadijah Siti, 2024).

Menurut PUPR (2017) dalam (Hadi *et al* ., 2021), jalan umum statusnya dikelompokkan atas, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Sedangkan berdasarkan kategori kondisi jalan dikelompokkan atas kondisi baik, kondisi sedang, dan kondisi rusak.

2.1.1.14 Pengukuran Rasio Ketersediaan Fasilitas Jalan

Infrastruktur jalan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Proyek infrastruktur mampu menciptakan jutaan lapangan kerja di Indonesia. Selain itu, infrastruktur jalan berperan penting dalam kelancaran distribusi barang, jasa, manusia, uang, dan informasi antar wilayah. Hal ini dapat menekan biaya transportasi, membuat harga barang dan jasa lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, pergerakan barang, jasa, dan informasi melalui infrastruktur jalan turut memengaruhi kestabilan harga antar daerah (Iek, 2020). Menurut PUPR (2017) dalam (Hadi *et al.*, 2021), untuk menggunakan indikator tingkat pelayanan jalan berdasarkan rasio panjang jalan dan luas wilayah. Rasio panjang jalan dengan luas wilayah diperoleh dengan membagi panjang jalan (km) dengan luas wilayah daerah terkait (km²). Nilai rasio ini memiliki arti panjang jalan yang terdapat di suatu daerah dalam 1km² luas wilayah yang menjadikan informasi tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio semakin baik aksesibilitas wilayah tersebut, sehingga konektivitas jalan di daerah tersebut juga semakin baik. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas jalan raya harus dilakukan secara merata dengan perhitungan rasio sebagai berikut:

$$\text{Ketersediaan Infrastruktur Jalan} = \frac{\text{Jumlah Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Luas wilayah}}$$

2.1.1.15 Teori Infrastruktur

Pembahasan tentang infrastruktur sering kali berkaitan dengan konsep barang publik. Berdasarkan teori infrastruktur, sifatnya sebagai barang publik menunjukkan adanya eksternalitas (Hariyani & Agustin, 2023)

Beberapa tokoh yang mengemukakan ide terkait konsep barang publik dan eksternalitas antara lain:

1) Paul Samuelson

Samuelson merupakan ekonom yang pertama kali mengenalkan konsep barang publik dalam teorinya. Dalam buku teks ekonomi klasiknya, Samuelson menjelaskan bahwa barang publik memiliki dua karakteristik utama; *non-ekskludabilitas*, yang berarti tidak dapat membatasi siapapun yang menggunakannya, dan *non-rivalitas*, yang berarti penggunaan oleh satu pihak tidak mengurangi penggunaan oleh pihak lain. Seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang merupakan contoh barang publik menghasilkan eksternalitas positif (Wirawijaya, 2021).

2) Arthur Pigou

Pigou adalah ekonom yang terkenal dengan teori eksternalitas. Pigou menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi dapat menghasilkan dampak sampingan yang mempengaruhi kesejahteraan sosial, baik itu positif maupun negatif. Dalam konteks infrastruktur, Pigou berpendapat bahwa banyak layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan dan fasilitas kesehatan, menciptakan eksternalitas positif yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara luas (Kenton, 2024).

Menurut Schult, (2004) dalam teori modal manusia (*human capital theory*) menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, pelatihan dan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas individu. Dalam makalahnya yang berjudul "*Investment in Human Capital*", Schultz mengemukakan bahwa

pendidikan dan pelatihan bukan hanya biaya, melainkan investasi yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, sehingga meningkatkan nilai produktivitas mereka di pasar kerja. Selain itu, Schultz juga menyoroti peran kesehatan sebagai komponen penting dari modalita manusia. Individu yang sehat lebih mampu bekerja dan belajar, sehingga meningkatkan produktivitas mereka.

2.1.1.16 Akses Internet

Internet merupakan kepanjangan dari *interconnected networking* atau jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai jenis komputer di seluruh dunia. Jaringan ini terhubung melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio, dan satelit. Istilah “internet” berasal dari bahasa latin “*inter*” yang berarti “antara”. Maka dari itu, internet memungkinkan komputer dengan sistem operasi dan aplikasi yang berbeda dapat saling terhubung dengan menggunakan protokol standar (Gani, 2014). Pemanfaatan internet yang semakin luas telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Internet kini menjadi sarana penting yang membuka berbagai peluang dan memberikan akses informasi yang belum ada sebelumnya. Di berbagai bidang, internet berperan sebagai alat yang mempermudah transformasi dan kemajuan yang cepat (Mohammad & Maulidiyah, 2023).

Akses internet merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk terhubung ke jaringan global internet dengan menggunakan perangkat seperti komputer dan lainnya. Koneksi ini, memungkinkan pengguna dalam mengakses berbagai layanan dan informasi yang tersedia secara online seperti media sosial dan platform lainnya (Nansa, 2024).

Di bidang pendidikan, internet telah membawa perubahan besar dalam cara kita belajar dan memperoleh informasi. Berbagai platform pembelajaran online dan sumber daya edukasi digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses pengetahuan dari seluruh dunia, tanpa terkendala batasan geografis. Dengan tersedianya kursus online, video tutorial, dan materi pendidikan interaktif, pendidikan menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil (Suhada *et al.*, 2022). Selain itu, internet juga menjadi sumber informasi mengenai kesehatan dan gaya hidup sehat, yang dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan mereka (Anisah *et al.*, 2021). Tidak hanya itu internet dalam bisnis memiliki manfaat yang baik dan berkembang, dari sekadar alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi sarana untuk menerapkan strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan (Oviliani, 2000).

2.1.1.17 Teori Internet

Terdapat beberapa teori dalam (Richard 2008) dengan judul “Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi” menjelaskan penggunaan internet.

1. Teori Kegunaan dan Gratifikasi (*Uses and Gratifications Theory*)

Teori Kegunaan dan Gratifikasi (*Uses and Gratifications Theory*) merupakan salah satu teori dalam kajian komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu secara aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Elihu Katz, Jay Blumler, dan Michael Gurevitch pada tahun 1974. Dalam teori ini, audiens dipandang sebagai subjek yang aktif dalam mengonsumsi media dan ketiga

tokoh tersebut mengemukakan bahwa konsumsi media massa, termasuk internet dianggap sebagai salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang bersifat personal maupun sosial.

Menurut Katz *et al.* (1974), terdapat lima kategori kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui media, yaitu:

- a. Kebutuhan Kognitif, kebutuhan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan wawasan.
- b. Kebutuhan Afektif, kebutuhan untuk memenuhi kepuasan emosional.
- c. Kebutuhan Integrasi sosial, kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain atau menjadi bagian dari komunitas
- d. Kebutuhan Identitas Pribadi, kebutuhan untuk memahami diri sendiri, membangun citra diri, atau meningkatkan rasa percaya diri.
- e. Kebutuhan Pelarian (Escapism), kebutuhan untuk melarikan diri dari tekanan atau rutinitas sehari-hari.

2. Teori *The Rise of the Network Society*

Castells (1996) dalam (Kizilhan & Bal Kizilhan, 2020) mengemukakan teori “*The Rise of the Network Society*” menjelaskan bagaimana peran internet dan teknologi komunikasi membentuk “masyarakat jaringan” dimana informasi, ekonomi, dan kekuasaan lebih terdesentralisir. Selain itu, Castells lebih menggambarkan bagaimana proses digitalisasi dapat menciptakan jaringan yang menghubungkan antara individu, organisasi, dan negara di tingkat global, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan lebih luas.

2.1.2 Kajian Empiris

Kajian empiris adalah sebuah proses yang diperlukan dalam membangun kerangka pemikiran, hal ini bertujuan agar kerangka pemikiran memiliki dasar yang kuat. Mencari penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian merupakan salah satu proses dalam membangun kerangka berpikir. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mujibaturrahman & Silvia (2023), Pengaruh Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Wilayah Barat	X= Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan, Y= IPM. Motode yang digunakan sama yaitu Desain penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan model FEM (<i>Fixed Effect Model</i>) yang menggunakan analisis regresi data panel.	X= PDRB, Infrastruktur jalan dan akses internet.	Indeks Pembangunan Manusia meningkat secara signifikan baik melalui infrastruktur pendidikan maupun kesehatan	<i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIMEK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Vol.8 No.2 Mei 2023: 101-112 ISSN.2549-8363</i>
2	(I. K. A. W. S. Putra & Yasa, 2021) Pengaruh Infrastruktur dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan dan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/kota Provinsi Bali	X= Infrastruktur dan pendidikan Y= IPM. Data skunder	X= Kemiskinan, PDRB, infrastruktur kesehatan, jalan, dan akses internet. Metode yang digunakan berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan metode analisis jalur.	Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di	<i>E-Jurnal EP Unud, 10 [3]: 1041 - 1070 ISSN 2303-017</i>

No	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kabupaten/Kota Provinsi Bali	
3	(Arafat & Rindayati, 2020), Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah	X= PDRB, Y= IPM	X= Infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dan akses internet	Variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap nilai IPM adalah PDRB perkapita.	<i>Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan</i> , hlm. 140-158 Vol 7 No 2
4	Saputra <i>et al.</i> , (2021), Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Terhadap Pembangunan Manusia Di Wilayah Timur Indonesia	X= PDRB, Infrastruktur jalan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Y= IPM	X= Infrastruktur pendidikan, kesehatan	IP-TIK memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan akses jalan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah timur Indonesia	<i>Menara Ekonomi</i> , ISSN: 2407-8565; <i>E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 1 – April 2021</i>
5	Rosyid & Lukito (2019), Hubungan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten	X= Infratraktur pendidikan, kesehatan, dan jalan, Y= IPM	X= PDRB dan akses internet	infrastruktur kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Namun, APBD untuk pendidikan tidak berpengaruh negatif dan signifikan IPM.	<i>UMT Journal Management System Vol.1 e-ISSN.2714-5603</i>
7	Y. W. Putra (2020), Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur sosial terhadap Indeks Pembangunan	X= Infrastruktur Y= IPM	X= PDRB dan akses internet.	pembangunan infrastruktur sosial seperti fasilitas air bersih, sanitasi, dan rumah	https://www.researchgate.net

No	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Manusia di 33 Provinsi di Indonesia			sakit memiliki dampak signifikan positif terhadap nilai IPM.	
8	W Nurfauziah (2021), Analisis PDRB, dan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	X= PDRB dan ketersediaan Infrastruktur. Y = IPM. Metode yang digunakan sama yaitu menggunakan jenis data panel.	X= Akses internet	PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM, Rasio Ketersediaan Fasilitas Pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM, Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM, dan Rasio Panjang Jalan memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM	<i>jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi (Vol. 8, Issue 2).</i>
9	Natasya & Faridatussalam (2024), <i>Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in West Sumatera.</i>	X= PDRB, Infrastruktur kesehatan, Y= IPM	X= Infrastruktur pendidikan, jalan, dan akses internet.	Jumlah puskesmas, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan PDRB per kapita tidak berpengaruh banyak terhadap IPM	https://doi.org/10.2991/978-94-6463-204-0_4

No	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				di Sumatera Barat.	
10	Hutabarat <i>et al</i> (2023), <i>Analysis of The Influence of Health Workforce, Educational Infrastructure, And Non-Food Per Capita Expenditure on The Human Development Index (HDI) In Humbang Hasundutan Regency.</i>	X= Infrastruktur pendidikan Y= IPM	X= Jumlah tenaga kesehatan, pengeluaran perkapita, PDRB, infrastruktur kesehatan, jalan, dan akses internet.	Jumlah tenaga kesehatan dan infrastruktur pendidikan sebagai determinan signifikan yang berdampak positif terhadap IPM.	<i>International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)</i> ISSN: 2509-0119.
11	Piqqa <i>et al</i> (2022), <i>The Effect of Health, Education, Infrastructure and Economic Growth Expenditures on The Human Development Index in Aceh Provinsi.</i>	X= Infrastruktur Y= IPM	X= PDRB, pengeluaran infrastruktur, dan akses internet	Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh, namun pembangunan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh.	<i>Journal of Malikussaleh Public Economics, Volume 05 Nomor 02 Desember 2022</i> E-ISSN : 2614-4573.
12	Liu <i>et al</i> ., (2023), <i>Infrastructure development, human development index, and CO2</i>	X= Infrastruktur Y= IPM	X= PDRB dan akses internet	Infrastruktur memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik dengan IPM	<i>Frontiers in Environmental Science</i>

No	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>emissions in China: A quantile regression approach</i>				
13	Dewi <i>et al.</i> ., (2021), <i>Impact of Information and Communication Technology on The Welfare of Population in Eastern Indonesia</i>	X= Akses internet, Y= IPM	X= PDRB, infrastruktur	Persentase pengguna internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM/HDI di Indonesia Bagian Timur.	<i>The 1st International Conference On Data Science And Official Statistics (ICDSOS)</i>
14	Inocencia M, (2019), <i>Self-Regulation of Internet Usage by Human Development Index.</i>	X= Akses internet, Y= IPM	X= PDRB, Infrastruktur Y= IPM	Industri yang bergerak cepat seperti internet, bergantung pada tingkat pembangunan manusia. Meningkatnya penggunaan internet mempengaruhi HDI.	<i>International Journal of Current Research Vol. 11, Issue, 10, pp.7795-7800, October, 2019.</i>
15	Azhayat (2024), <i>The Influence of Road Infrastructure on The Human Development Index in Spesial Region of Yogyakarta.</i>	X= PDRB, infrastruktur jalan, Y= IPM	X= infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan akses internet	Nilai indeks pembangunan manusia di DIY dipengaruhi secara signifikan oleh infrastruktur jalan, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), dan tingkat upah minimum.	https://dspac.e.uii.ac.id

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan PDRB dengan IPM

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah. Peningkatan PDRB mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita (BPS, 2024). Hal ini memungkinkan peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan daya beli masyarakat, yang secara langsung berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan alokasi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan teori “*Human Capital*” (Becker, 1961) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan PDRB harus diimbangi dengan investasi dalam sumber daya manusia (SDM), termasuk pendidikan dan kesehatan, yang akan berkontribusi pada IPM

Dalam penelitian Novita & Prasetyo, (2020) yang menyatakan bahwa komponen pengeluaran dalam PDRB, khususnya konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah, memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM di daerah, karena keduanya memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengakses layanan dasar. Amalia & Hasan, (2019) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan produktivitas perekonomian sehingga tingkat pendapatan mengalami kenaikan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Woyanti (2021) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat meningkatkan IPM karena distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menjadi salah satu penyebab.

2.2.2. Hubungan Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan dengan IPM

Menurut Minarti (2011) dalam (Tristina *et al.*, 2024) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan salah satu komponen dalam eksistensi manusia. Penyediaan sarana pendidikan yang dapat mendukung pengembangan kemampuan dan potensi individu dapat membawa manfaat bagi individu itu sendiri maupun kesejahteraan bersama. Pendidikan juga merupakan komponen dari kondisi manusia, yang pada kenyataannya memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan individu. Selain itu, pendidikan adalah investasi nasional yang sangat penting, terutama bagi negara berkembang, dimana pendidikan menjadi satu-satunya cara untuk merencanakan dan mewujudkan pembangunan. Hal ini memungkinkan peningkatan kualitas hidup melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merupakan komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejalan dengan teori “*Endogenous Growth*” dari Lucas (1988) dalam (Mifrahi & Hanif Nur Rahmat, 2023) menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur pendidikan yang memadai mendukung akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, dan dalam teori *Human Capital*, Schultz mengemukakan Konsep modal manusia memiliki dampak

yang signifikan terhadap bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontruksi tersebut dapat dicapai melalui Peningkatan efisiensi dan keterampilan kerja. Sistem pendidikan yang baik juga akan menghasilkan tenaga kerja yang baik Mujibaturrahmah & Silvia (2023).

Dalam penelitian Mujibaturrahmah & Silvia (2023) infrastruktur pendidikan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Sinaga (2020) menunjukkan hasil bahwa infrastruktur pendidikan mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.3. Hubungan Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan dengan IPM

Menurut Afifah (2024), kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dan faktor utama yang mendukung pertumbuhan serta kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia. Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, seperti rumah sakit, klinik dan tenaga medis dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi miskin. Karena kesejahteraan masyarakat merupakan indikator utama yang menggambarkan kondisi kehidupan yang sejahtera, sehat, dan damai. Terdapat hubungan antara infrastruktur kesehatan dan IPM karena dengan adanya infrastruktur kesehatan yang memadai dapat menurunkan angka kematian sehingga dapat meningkatkan salah satu komponen utama dari IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Hal tersebut sejalan dengan teori "*Health Capital*" dari

Grossman (1972) dalam (Galama & Kippersluis 2013) mengemukakan bahwa kesehatan adalah modal manusia yang penting bagi produktivitas dan kualitas hidup.

Dalam penelitian Mujibaturrahmah & Silvia (2023) menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Sinaga (2020) menunjukkan hasil bahwa infrastruktur pendidikan mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.4. Hubungan Ketersediaan Infrastruktur Jalan dengan IPM

Infrastruktur jalan berperan dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, yang memfasilitasi mobilitas barang, jasa, dan individu. Peningkatan infrastruktur jalan dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses ke tempat pembelanjaan atau pasar, pendidikan, serta layanan kesehatan. Hal ini terdapat hubungan yang positif terhadap beberapa komponen IPM seperti Angka Partisipasi Sekolah (APK), Angka Harapan Hidup (AHH), dan kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya jalan yang baik akses ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar dapat menjadi lebih mudah.

Dalam penelitian Brata, (2019) menunjukkan bahwa infrastruktur jalan/rasio panjang jalan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Rosyid & Lukito (2019), menunjukkan hasil bahwa infrastruktur jalan mempunyai

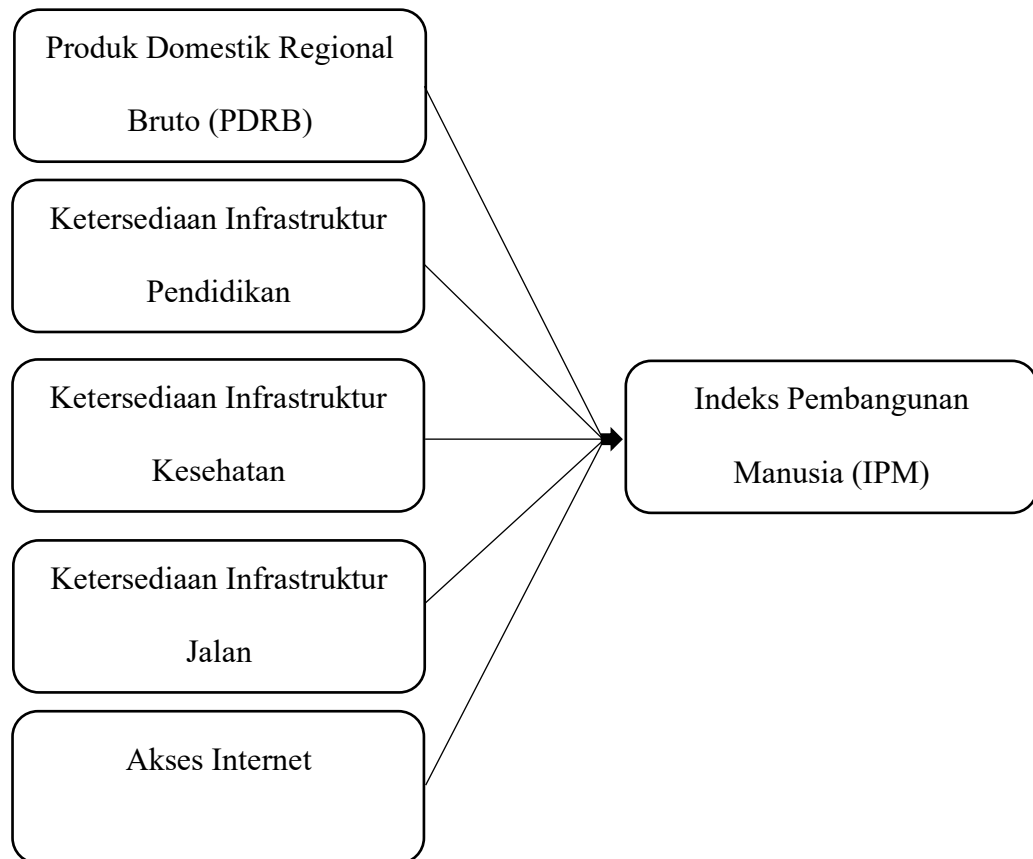
hubungan negatif dan tidak signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.5. Hubungan Akses Internet dengan IPM

Menurut Ritonga *et al*, (2020), peningkatan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti produksi, penjualan, pendapatan, laba, pengembalian investasi, pengembangan produk, area pemasaran, dan sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena internet berfungsi sebagai media penyedia informasi dan mempermudah komunikasi, sehingga menjadi alat yang efektif untuk promosi produk dan jasa. Kualitas internet yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam akses informasi, komunikasi, dan transaksi. Selain itu, internet juga mempermudah akses informasi di berbagai bidang, seperti pendidikan, yang dapat diakses dengan mudah melalui telepon pintar atau laptop, sehingga akses internet terdapat hubungan positif terhadap beberapa komponen IPM seperti Angka Partisipasi Sekolah (APK), Angka Harapan Hidup (AHH), dan kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya akses internet yang baik dapat mendukung pendidikan jarak jauh, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kesehatan, dan memudahkan dalam pemasaran barang/jasa. Hal tersebut sejalan dengan teori “*The Rise of the Network Society*” dari Castells (1996) dalam (Kizilhan & Kizilhan, 2020) yang menjelaskan bahwa internet memainkan peran penting dalam meningkatkan akses informasi, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam penelitian Rosyidin (2018), akses internet mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penjelasan pelaksanaan penelitian ini, membutuhkan kerangka berpikir agar dapat mempermudah dan memahami penelitian yang akan dilakukan. Kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu proposisi atau asumsi yang dianggap mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, atau penelitian lebih lanjut. Asumsi yang diajukan sebagai hipotesis juga dapat dianggap sebagai data, namun karena sifatnya yang belum pasti, penggunaannya sebagai dasar pengambilan keputusan memerlukan pengujian terlebih dahulu menggunakan data hasil observasi. Dalam pengujian hipotesis, terdapat dua jenis hipotesis utama, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) (Junaedi & Wahab, 2023). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDRB, ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dan akses internet berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Diduga secara bersama-sama PDRB, ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dan akses internet berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).